

ABSTRAK

Akta PKR RUPS memuat keterangan penghadap (orang yang bertindak selaku kuasa RUPS) kepada notaris untuk menuangkan/ menyatakan putusan RUPS tersebut dalam akta notaris (Akta PKR RUPS). Pembatalan akta PKR RUPS termasuk juga pembatalan terhadap risalah rapat yang dibuat dibawah tangan, hanya dapat dilakukan melalui mekanisme RUPS bukan penghadap yang memberikan keterangan dalam akta PKR RUPS tersebut dan hanya terhadap perubahan anggaran dasar atau perubahan data perseroan yang belum berlaku efektif.

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum sehingga metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum dan permasalahan hukum yang ada, sehingga hasil dari penelitian hukum ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai isu hukum yang diajukan serta dapat diterapkan dalam praktek hukum pemerintahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

Pertama, Perubahan anggaran dasar yang telah mendapatkan persetujuan Menteri, maka akta PKR RUPS tersebut menjadi suatu akta Otentik sehingga perubahan anggaran dasar tersebut telah berlaku efektif dan pembatalannya hanya dapat dilakukan melalui konstruksi hukum RUPS lagi dengan agenda (acara rapat) perubahan anggaran dasar kembali bukan dengan Konstruksi Hukum Membatalkan Perubahan anggaran dasar tersebut. Pembatalan hanya dapat dilakukan terhadap putusan RUPS mengenai perubahan anggaran dasar yang belum berlaku.

Kedua, Notaris tidak bertanggung jawab atas isi/materil terhadap isi risalah rapat yang dibuat di bawah tangan, notaris hanya bertanggung jawab atas pernyataan dan dokumen yang disampaikan oleh penghadap serta menjamin bahwa para penghadap tersebut berwenang untuk menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut. Dalam Akta PKR RUPS tersebut yang dapat diminta pertanggung jawaban yaitu Ketua RUPS sebagai pihak yang bertanggung jawab atas Notulen yang dijadikan dasar oleh Notaris untuk dituangkan menjadi Akta PKR RUPS.

Kata kunci: Notaris, Akta, PKR

ABSTRACT

The Act of PKR RUPS includes the information of the one who appeared (the one acting as the legal authority of RUPS) before the Notary the express/to state the decision of the RUPS in the Notary act (the Act of PKR RUPS). The cancellation of the act of PKR RUPS also include the cancellation of the minutes of meeting made illegally, can only be done through mechanism of RUPS not through the one appeared giving the information in the act of PKR RUPS and only against the change of the articles of association or the change of the company/Firm data which has not yet been effective.

This research is a law research so the methode used is law research methode which is done to search the problem solving upon the law issues and the present law problem, so that the result of this law research is giving the prescription as to what should be given about the law issue put forward so it can be well applied in the government law practice. The approach used in the law research are the statue approach and the conceptual approach.

The result of the research shows that :

Firstly, the change of the articles of association which has obtained the agreement of the Minister then the act of PKR RUPS has been an Authentic act so that the change of the articles of the association has been effective and its cancellation can be done through the law construction of RUPS with the agenda (the minutes of meeting) of the change of articles of association. The cancellation can only be done against the RUPS decision regarding the change of the articles of association not yet effective.

Secondly, the Notary is not responsible on the material content of the minutes of meeting made underhand (secretly), the Notary is only responsible on the statement and document delivered by the one appear before him/her as well as to guarantee that the one who appear before him/her has authority to sign the statement of the meeting decision statement. In the act of PKR RUPS the one who can be responsible is the head of RUPS as the party/side who is responsible upon the minutes of meeting which is used as the basic by the Notary to be described into the act of PKR RUPS.

The key words : Notary, Act, Meeting Decision Statement(PKR)